

Menalar Formalitas *Corporate Social Responsibility* dengan Perspektif *Institutional Theory*

Gjosphink Putra Umar Sakka¹
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Airlangga, Indonesia
Email: gjosphink.putra.umar-2018@feb.unair.ac.id

ABSTRAK

Teori *Corporate Social Responsibility* (CSR) selama ini selalu dikaitkan dengan konsep dengan hak dan tanggung jawab serta konsep keberlanjutan. Teori tersebut memang tepat untuk melihat inisiatif perusahaan melakukan CSR dengan catatan perusahaan tersebut dalam kondisi kinerja keuangan yang baik. Yang menjadi masalah disini yaitu apabila suatu perusahaan belum mampu memenuhi tuntutan target profitnya kepada shareholder, maka disitu aturan CSR yang berlaku hanya dipandang sebagai sebuah formalitas tanpa esensi tujuan awal CSR itu sendiri. Artikel ini bertujuan mengajukan teori *institutional* untuk menambahkan literasi teori CSR sesuai dengan kasus tersebut.

Kata Kunci: Formalitas; Tanggung Jawab Sosial Perusahaan; Teori Kelembagaan.

Reasoning the Formality of Corporate Social Responsibility with the Perspective of Institutional Theory

ABSTRACT

Theory of Corporate Social Responsibility (CSR) has always been associated with the concept of rights and responsibilities and the concept of sustainability. The theory is indeed appropriate to see the company's initiative to do CSR with the company's record in a condition of good financial performance. The problem here is that if a company has not been able to meet the demands of its target profit to shareholders, then there the applicable CSR rules are only seen as a formality without the essence of the initial CSR objectives themselves. This article aims to propose an institutional theory to add literacy theory to CSR in accordance with the case.

Keywords: Formality; Corporate Social Responsibility; Institutional Theory.

The Article is Available in : <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/index>



E-JA
e-Jurnal Akuntansi
e-ISSN 2302-8556

Vol. 30 No. 6
Denpasar, Juni 2020
Hal. 1498-1507

Artikel Masuk:
8 Desember 2019

Tanggal Diterima:
23 Desember 2020

PENDAHULUAN

Bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan dapat menimbulkan biaya yang sering dikenal dengan biaya lingkungan. Biaya lingkungan antara lain biaya pencegahan, biaya pendeteksian, biaya kegagalan internal, dan biaya kegagalan eksternal dan pencatatannya menggunakan akuntansi lingkungan. Akuntansi lingkungan hadir sebagai solusi untuk mengatasi isu-isu terkait. Akuntansi lingkungan menjelaskan langkah-langkah dan laporan tentang alokasi sumber daya lingkungan, biaya, pengeluaran dan risiko untuk berbagai kelompok industri, untuk perusahaan tertentu, atau di dalam perusahaan untuk departemen, proyek, kegiatan, atau proses tertentu (Dascalu *et al.*, 2010). Akuntansi lingkungan lebih cenderung menyoroti masalah aspek sosial atau dampak dari kegiatan secara teknis, yang tentunya berkaitan dengan *corporate social responsibility* (CSR) Ratnadi *et al.* (2020), *green corporation*, *green business*, dan *green finance*.

Teori CSR yang menjadi dasar dari akuntansi lingkungan sendiri selama ini selalu dikaitkan dengan konsep hak dan tanggung jawab serta *sustainability*. Konsep-konsep tersebut terlihat sempurna, beretika dan menguntungkan semua pihak sehingga cenderung terkesan seperti sebuah utopia di masa ini Ratnadi *et al.* (2020). Tetapi terdapat sebuah kesenjangan dalam kenyataan praktik yang dilangkahi dan dihindari oleh para pencetus konsep-konsep yang membangun CSR. Adapun kenyataan tersebut adalah fakta dasar bahwa kegiatan bisnis pada hakikatnya selalu diawali untuk mencari keuntungan. Konsep keberlanjutan seperti *Triple Bottom Line* (Kaptein & Wempe, 2002) dan (Van Marrewijk, 2003) memang telah menyinggung profit atau laba sebagai salah satu indikator dasarnya.

Namun, hal tersebut dirasa belum mencakup keseluruhan kasus di lapangan. Sebagai contoh perusahaan-perusahaan dengan kegiatan bisnis yang lancar serta finansial yang baik mungkin melakukan CSR. Hal ini merupakan sebuah keharusan dan hal yang lumrah bagi mereka. Akan tetapi bagi perusahaan yang baru berkembang dan secara finansial belum stabil bisa jadi menganggap bahwa CSR merupakan sebuah aturan yang harus dipenuhi demi meningkatkan nilai perusahaan dan memenuhi regulasi serta menghindari sanksi hukum yang ada, Ratnadi *et al.* (2020). Dari motivasi ini terlihat bahwa esensi dari kegiatan CSR itu sendiri bergeser dari tujuan awalnya menjadi sesuatu yang dilakukan secara terpaksa dan hanya menjadi pemenuhan kewajiban, terutama bagi perusahaan yang belum stabil secara finansial. Muncullah teori seperti *stakeholder theory*, *legitimacy theory*, maupun *institutional theory* yang digunakan untuk menjelaskan penyebab penerapan CSR (Fernando & Lawrence, 2014).

Artikel ini akan mencoba menganalisa kegiatan CSR dan aturan yang berlaku di Indonesia menggunakan *institutional theory*/teori kelembagaan. *Institutional theory* mempelajari bentuk organisasi dan menjelaskan karakteristik atau bentuk homogen dalam organisasi yang berada dalam satu bidang organisasi seperti supplier kunci, konsumen, dan kompetitor, DiMaggio & Powell (1983). Fokus dan motivasi penelitian ingin membahas formalitas penerapan CSR dengan aturan di perusahaan dengan menggunakan *institutional*

theory dengan harapan, hasil tulisan ini dapat membentuk pemahaman baru mengenai definisi dalam CSR dan aturan-aturannya dari sudut pandang yang berbeda dan memperkaya literatur CSR.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu jenis penelitian yang mana hasilnya diperoleh bukan melalui prosedur statistik dengan tujuan untuk mengungkapkan gejala holistik-kontekstual dengan menjadikan peneliti sebagai instrumen kunci (Sugiarto, 2017).

Studi literatur menjadi teknik pengumpulan data mengenai *Corporate Social Responsibility* khususnya yang berlaku di Indonesia. Studi literatur merupakan sumber tertulis yang berasal dari buku, jurnal, dokumen, maupun media massa (Sugiono, 2015).

Tulisan ini dibagi menjadi beberapa tahap. Pertama membahas penerapan CSR beserta isu dan permasalahannya. Selanjutnya melakukan *review* literatur terhadap formalitas CSR yang berfokus menggunakan teori institusional khususnya peraturan pemerintah (PP) dan undang-undang (UU) tentang CSR di Indonesia. Terakhir yaitu kesimpulan dan rangkuman hasil analisis dari pembahasan sebelumnya beserta kekurangan penelitian dan potensi penelitian lanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

CSR adalah istilah yang telah ada, akan tetapi tidak selalu sama untuk semua orang. CSR umumnya dianggap sebagai solusi yang akan menyelesaikan masalah global kesenjangan kemiskinan, pengucilan sosial dan degradasi lingkungan (Göbbels, 2002) dan (Votaw & Sethi, 1973). Definisi CSR sendiri terbentuk tergantung dari perspektif dan pendekatan yang digunakan. Beberapa pendekatan yang lazim digunakan antara lain *shareholder approach*, *stakeholder approach*, *societal approach* dan *philanthropic approach*. Adapun esensi dari pendekatan-pendekatan tersebut bermuara selalu terkait kepada konflik antara hak dan tanggung jawab, individualitas dan keanggotaan serta otonomi dan heteronomi (Van Marrewijk, 2003). Konflik kepentingan tersebut mengilhami beberapa pengusaha untuk membenahi bisnis mereka. Akan tetapi mayoritas mengabaikan tanggung jawab akan dampak bisnis mereka terhadap lingkungan dan sosial. Hal tersebut memunculkan kekuatan penyeimbang (organisasi non-pemerintah) yang menekan bisnis untuk lebih bertanggung jawab dalam sistem operasional bisnis mereka (Aldashev *et al.*, 2015). Jadi disini keuntungan tidak hanya berfokus pada pelaku bisnis dan negara, tetapi juga terhadap masyarakat dan lingkungan. Inilah latar belakang dari konsep *sustainability development* yang umumnya dipakai.

CSR umumnya didefinisikan sebagai komitmen etis untuk beroperasi dengan cara yang berkelanjutan secara ekonomi dan lingkungan sambil mengakui kepentingan para pemangku kepentingan, serta strategi pengambilan keputusan yang terkait nilai-nilai etis, kepatuhan terhadap persyaratan hukum, dan rasa hormat terhadap orang, komunitas, dan lingkungan (Mijatovic, Miladinovic, & Stokic, 2015). Adapun dimensi yang umumnya diungkapkan dalam CSR yaitu dimensi lingkungan, hubungan masyarakat, keragaman, hak

asasi manusia, serta aktivitas CSR media mereka.

Tabel 1. Aturan beserta ikhtisar terkait dengan Corporate Social Responsibility di Indonesia

Aturan	Ikhtisar	Fokus
UU No.40/2007 tentang Persroan Terbatas	Mengatur kewajiban bagi yang berkaitan denganSDA untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, dan bila tidak dijalankan maka akan dikenakan sesuai dengan peraturan	Terdapat unsur kewajiban pelaksanaan disertai sanksi atas pelanggaran
PP No. 47/2012 tentang tanggung jawab sosial	Tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan direksi setelah mendapat persetujuan RUPS	Terdapat unsur kewajiban pelaksanaan
UU No.25/2007 tentang penanaman modal	Setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan	Terdapat unsur kewajiban pelaksanaan
UU No.32/2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Setiap orang yang melakukan usaha berkewajiban memberikan informasi terkait perlindungan lingkungan hidup, menjaga fungsi lingkungan hidup, dan menaati ketentuan mutu lingkungan hidup	Terdapat unsur kewajiban pelaksanaan
UU No. 4/ 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara	Pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat	Terdapat unsur kewajiban pelaksanaan
PP No.23/2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara	Setiap pemegang IUP Operasi produk dan IUPK operasi produksi wajib menyampaikan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setiap 6 bulan	Terdapat unsur kewajiban pelaksanaan disertai sanksi atas pelanggaran
UU No.21/2014 tentang panas bumi	Masyarakat berhak memperoleh manfaat atas kegiatan usaha melalui kewajiban perusahaan memenuhi tanggung jawab sosial perusahaan	Terdapat unsur kewajiban pelaksanaan

Sumber: Data Penelitian, 2019

Inisiatif CSR perusahaan-perusahaan ini berbeda menurut jenis perusahaan, dan ukuran perusahaan juga memiliki pengaruh pada inisiatif pelaporan CSR (Hou & Reber, 2011). Aturan yang terkait CSR di Indonesia tertera di beberapa undang-undang di beberapa tahun terakhir di Indonesia sendiri mewajibkan perusahaan menganggarkan dan melaksanakan program Corporate Social Responsibility yang bertujuan sebagai bentuk tindakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

Sekarang dapat terlihat mengapa perusahaan di Indonesia banyak mengadopsi CSR. Hal tersebut karena perusahaan merasa berkewajiban untuk melakukannya terlebih lagi terdapat aturan yang mengatur kewajibannya dan beberapa disertai ancaman sanksi atas pelanggarannya. Tabel 1. Menunjukkan

terdapat kesamaan berupa adanya unsur kewajiban dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan beserta sebagian aturan yang diiringi sanksi apabila terdapat pelanggaran kegiatan maupun pelaporannya. Untuk lebih mendalami dan memahami isu tersebut, artikel ini menggunakan teori perspektif *institutional theory*. Di dalam teori institusional terdapat dimensi *isomorphism* yaitu proses homogenisasi yang memaksa satu unit dalam populasi untuk menyerupai unit lain yang menghadapi kondisi lingkungan yang sama. Hal itu terjadi karena sebuah perusahaan atau organisasi terdiri dari kumpulan individu yang dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Adapun *isomorphism* dikategorikan menjadi tiga: *coercive isomorphism*, *mimetic isomorphism*, dan *normative isomorphism*. *Coercive isomorphism* menunjukkan bahwa organisasi mengambil beberapa bentuk atau melakukan adopsi terhadap organisasi lain karena tekanan-tekanan negara dan organisasi lain atau masyarakat yang lebih luas. *Mimetic isomorphism*, yaitu imitasi sebuah organisasi oleh organisasi yang lain. sedangkan *normatif isomorphism* terjadi karena adanya tuntutan profesional (DiMaggio & Powell 1983).

Perusahaan atau pelaku bisnis pada dasarnya memiliki tuntutan yang harus mereka penuhi dalam bisnis yang mereka lakukan. pertama yaitu tuntutan ekonomi yang mana mengarahkan perusahaan untuk menerapkan strategi atau tindakan-tindakan yang berdampak pada efektifitas dan efisiensi sistem dan operasional bisnis sehingga dapat memenuhi target profit demi meningkatkan kemakmuran *stakeholder*, yang mana dijelaskan dalam teori *stakeholder*. *Stakeholder theory* adalah teori fundamental mengenai bagaimana bisnis bekerja dan bagaimana untuk mencapainya (Freeman *et al.*, 2010). *Stakeholder theory* intinya berbicara bagaimana menciptakan nilai dan perdagangan bagi perusahaan serta bagaimana mengelola bisnis usaha secara efektif. Banyak variabel yang dapat diteliti untuk meningkatkan nilai suatu perusahaan seperti ukuran perusahaan, pertumbuhan perusahaan, struktur modal, maupun profitabilitas perusahaan (Dhani & Utama, 2017), (Pratama & Wiksuana, 2016), dan (Suwardika & Mustanda, 2017). Selain itu pengungkapan CSR juga dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan

Tidak dapat dipungkiri bahwa profitabilitas menjadi salah satu “*core*” untuk meningkatkan nilai suatu perusahaan. Dalam proses pemenuhan tuntutan profit tersebut, perusahaan akan melakukan ekspansi dan pengembangan bisnis untuk mengumpulkan keuntungan mereka, meskipun kadangkala mengakibatkan dampak negatif disekitarnya. Dalam proses tersebutlah adakalanya terjadi gesekan antara perusahaan dengan masyarakat maupun lingkungan sekitarnya yang menyebabkan kritik dan tekanan bagi perusahaan baik dari masyarakat langsung maupun dari LSM untuk merubah sistem operasi dan bisnis yang dianggap merusak. Dari sinilah muncul tuntutan lainnya yaitu tuntutan legitimasi. Teori Legitimasi menjelaskan bahwa organisasi yang merupakan bagian dari sistem sosial (disini diartikan perusahaan) berusaha menyelaraskan norma maupun nilai bawaan pada kegiatan organisasi dengan nilai, norma, maupun perilaku masyarakat yang terdapat di sekitar organisasi (Dowling & Pfeffer, 1975). pada akhirnya dibatasi dengan munculnya tekanan dan aturan yang meminta pertanggung jawaban sosial dan lingkungan dalam proses bisnisnya. Disini perusahaan pada umumnya mengambil proses tindakan

isomorphism dalam *institutional theory* untuk menyesuaikan, mengadopsi, dan mengadaptasi kegiatan usahanya dengan lingkungan di sekitarnya. Terdapat tiga proses *isomorphism* yang telah disebutkan sebelumnya yaitu *coercive*, *mimetic*, dan *normative*.

Pertama, proses *coercive isomorphism* berkaitan dengan faktor-faktor eksternal seperti pengaruh pemegang saham, karyawan, dan kebijakan pemerintah. Proses ini muncul karena tekanan dari pemangku kepentingan yang kuat atau kritis untuk mengubah praktik kelembagaan organisasi. Proses adopsi ini disebabkan tekanan dari lingkungan sekitar dan juga ketidakpastian lingkungan. Contoh jelas *isomorphism* ini dapat seperti pelaporan CSR (Deegan, 2009). CSR dalam proses ini dilakukan akibat adanya tekanan yang diberikan oleh pihak eksternal sehingga memaksa perusahaan untuk menerapkan CSR di aktifitas bisnisnya. Proses *coercive* logikanya mendorong perusahaan untuk menerapkan CSR sebagai syarat atau formalitas untuk memenuhi tuntutan dari pemangku kepentingan yang kuat dan cenderung mengabaikan harapan dari pihak pemangku kepentingan lainnya. Hal ini dapat berdampak pada kegiatan CSR yang dibuat sebatas memenuhi harapan para pemegang saham, karyawan, dan pemerintah pusat. Sedangkan pemangku kepentingan yang lemah seperti warga sekitar kurang mendapatkan perhatian dari kegiatan CSR perusahaan. Hal ini dapat menimbulkan gesekan antara perusahaan dengan warga disekitar lokasi perusahaan. Selain itu dengan melihat Tabel 1. dapat disimpulkan adanya kemungkinan proses *coercive* dilakukan oleh perusahaan dikarenakan adanya kewajiban tanggung jawab sosial bagi perusahaan dan pemberian sanksi atas pelanggaran aturan CSR tersebut.

Kedua, proses *mimetic isomorphism* yang diakibatkan oleh lingkungan organisasi yang berusaha meniru atau menyalin praktik organisasi lain, demi mendapatkan keunggulan kompetitif (DiMaggio & Powell, 1983). Apabila tempat perusahaan tersebut berada menerapkan praktik CSR timbul kesan bahwa kegiatan bisnis dianggap layak apabila telah menerapkan CSR di kegiatan usahanya. Kegiatan CSR maupun pelaporan CSR dalam annual report, integrating report, maupun sustainability report menjadi contoh dari homogenisasi ini. *Mimetic* memiliki kekurangan yaitu kegiatan CSR cenderung dilakukan perusahaan dengan niat untuk mendapatkan keunggulan baik menambah citra maupun nilai perusahaan demi meyakinkan publik bahwa perusahaan tersebut peduli lingkungan, padahal belum tentu apa yang dilakukan dan dilaporkan bisa jadi bukanlah keseluruhan dari kenyataan dan tidak sejalan dengan tujuan awal CSR. Hal ini didukung oleh beberapa penelitian (Murnita & Putra, 2018), (Sabatini & Sudana, 2019), dan (Stacia & Juniarti, 2016) yang menemukan adanya hubungan antara CSR dengan nilai perusahaan. Selain itu beberapa penelitian juga mengungkapkan pengaruh CSR atas kinerja keuangan perusahaan (Gantino, 2016), (Luthan, *et al.*, 2018), (Sakti & Pudjolaksono, 2017), dan (Sudaryanti & Riana 2017).

Ketiga, proses *normative isomorphism* adalah bentuk terakhir *isomorphism* perusahaan akibat tekanan dari norma dan etika yang memang dibutuhkan untuk mengadopsi praktik kelembagaan tertentu (DiMaggio & Powell, 1983). Normative diambil karena apabila individu yang mendapat pelatihan yang sama dari satu institusi tidak mengadopsi hal yang sama, maka akan beresiko di

kucilkan oleh komunitas.

Tabel 2. Jenis proses *Isomorphism*, Contoh, dan Kekurangan

Jenis <i>Isomorphism</i>	Contoh terkait CSR	Kekurangan
<i>Coercive Isomorphism</i> (Proses homogenisasi di suatu lembaga yang diakibatkan tekanan dan ketidakpastian dari lingkungan)	Penerapan kegiatan beserta laporan terkait CSR yang hanya ditujukan untuk para pemangku kepentingan tertentu dikarenakan kelompok tersebut memiliki pengaruh yang kuat bagi perusahaan	laporan CSR dibuat sebatas memenuhi harapan para pemegang saham, karyawan, dan pemerintah pusat. Sedangkan pemangku kepentingan yang lemah seperti warga sekitar tidak mendapatkan proporsi seimbang. Hal ini juga memicu formalitas dalam kegiatan dan pelaporan CSR.
<i>Mimetic Isomorphism</i> (proses homogenisasi di suatu lembaga yang hanya melakukan imitasi dari lembaga lainnya)	Penerapan kegiatan dan laporan terkait CSR seperti dalam annual report, integrating report, maupun sustainability report yang mencontoh perusahaan di sektor yang sama demi keunggulan kompetitif dan meningkatkan nilai perusahaan	Laporan CSR dibuat untuk memperoleh keunggulan kompetitif dan meningkatkan nilai dari perusahaan tersebut
<i>Normative Isomorphism</i> (Proses homogenisasi yang didopsi dikarenakan adanya tekanan norma dan etika profesionalisme)	Penerapan kegiatan dan laporan terkait CSR yang disusun oleh akuntan suatu perusahaan dengan mengikuti aturan yang berlaku untuk menghindari pengucilan dari komunitas.	laporan CSR yang tidak tertulis secara eksplisit di dalam aturan akan memicu ambiguitas pelaporan

Sumber: Data Penelitian, 2019

Contoh sederhana dari proses ini adalah laporan keuangan bagi perusahaan yang disusun oleh akuntan sesuai standar akuntansi yang berlaku. Proses ini memang efektif bagi praktik mandatory reporting yang tersusun secara baku seperti yang ada di dalam IFRS maupun PSAK. Namun apabila laporan berbentuk voluntary reporting maka bentuk laporannya akan menjadi beragam dan berbeda satu sama lain, yang mana dapat memunculkan ambiguitas pelaporan. Pada kasus ini maka etika profesionalisme lah yang menjadi patokan bagi seorang akuntan. Ketiga proses *isomorphism* ini dan kaitannya beserta contoh terkait CSR disertai kekurangannya akan dirangkum di Tabel 2.

SIMPULAN

Banyak literasi CSR yang mendefinisikan tanggung jawab dengan menggunakan konsep hak dan kewajiban maupun sustainability sebagai jalan tengah antara konflik kepentingan di perusahaan. Hal tersebut memang benar adanya dan didukung oleh tulisan-tulisan terdahulu. Akan tetapi disini penulis memberikan

sebuah kontribusi gagasan baru dengan mempelajari CSR secara dalam dengan menggunakan perspektif teori Institusioal dengan berbagai bentuk prosesnya. Artikel ini juga memberikan contoh dampak dari proses *isomorphism* yang diambil perusahaan dengan melihat kondisi saat ini yang mana timbul anggapan-anggapan di dunia bisnis melihat dan memahami CSR. Ada yang menganggap CSR sebagai formalitas dan pemenuhan kewajiban semata dikarenakan desakan pihak lain, anggapan yang melihat CSR dilakukan sebatas meniru perusahaan kompetitor di sektor yang sama untuk menaikkan nilai perusahaan, maupun CSR yang dilakukan karena norma, etika, serta profesionalisme bisnis.

Implikasi artikel memberikan kontribusi dalam mengembangkan penjabaran dan melengkapi teori CSR yang telah ada sesuai dengan aturan yang pernah berlaku hingga saat ini di Indonesia, sehingga dapat bermanfaat bagi akademisi maupun praktisi dalam memahami arti *Corporate Social Responsibility* dan alasan di balik penerapannya di perusahaan melalui kacamata *institutional theory* beserta ketiga proses *isomorphism* di dalamnya. Harapannya akademisi dan praktisi dapat memahami mengarah kemana kegiatan CSR perusahaan terkait dan bagaimana dampak kedepannya. Kelemahan dari penelitian ini yaitu bersifat wacana dan teoritis menggunakan sumber yang berasal dari literatur sebelumnya dan masih membutuhkan penelitian lanjutan sesuai dengan kenyataan di lapangan. Selain itu penelitian ini belum memberikan langkah-langkah ataupun jalan keluar untuk memperbaiki kekuarangan dari proses tersebut dikarenakan penelitian yang diambil dari studi literatur. Penelitian selanjutnya dapat melanjutkan penelitian dengan metode kualitatif untuk menggambarkan kondisi nyata di lapangan melalui para informan dengan menggunakan metode studi kasus maupun metode fenomenologi.

REFERENSI

- Aldashev, G., Limardi, M., & Verdier, T. (2015). Watchdogs of the Invisible Hand: NGO monitoring and industry equilibrium. *Journal of Development Economics*, 116, 28-42. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2015.03.006>
- Dascalu, C., Caraiani, C., Lungu, C. I., Colceag, F., & Guse, G. R. (2010). The externalities in social environmental accounting. *International Journal of Accounting & Information Management*.
- Deegan, C. (2009). *Financial accounting theory* McGraw Hill. North Ryde, NSW, Australia.
- Dhani, I. P., & Utama, A. A. G. S. (2017). Pengaruh Pertumbuhan Perusahaan, Struktur Modal, dan Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga*, 2(1).
- DiMaggio, P. J., & Powell, W. W. (1983). The iron cage revisited: Institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields. *American Sociological Review*, 147-160.
- Dowling, J., & Pfeffer, J. (1975). Organizational legitimacy: Social values and organizational behavior. *Pacific Sociological Review*, 18(1), 122-136.
- Fernando, S., & Lawrence, S. (2014). A theoretical framework for CSR practices: integrating legitimacy theory, stakeholder theory and institutional theory.

- Journal of Theoretical Accounting Research*, 10(1), 149–178.
- Freeman, R. E., Harrison, J. S., Wicks, A. C., Parmar, B. L., & De Colle, S. (2010). *Stakeholder theory: The state of the art*. Cambridge University Press.
- Gantino, R. (2016). Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2008-2014. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 3(2), 19–32.
- Göbbels, M. (2002). Reframing corporate social responsibility: The contemporary conception of a fuzzy notion.
- Hou, J., & Reber, B. H. (2011). Dimensions of disclosures: Corporate social responsibility (CSR) reporting by media companies. *Public Relations Review*, 37(2), 166–168.
- Kaptein, M., & Wempe, J. F. D. B. (2002). *The balanced company: A theory of corporate integrity*. Oxford University Press, USA.
- Luthan, E., Rizki, S. A., & Edmawati, S. D. (2018). Pengaruh pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap kinerja keuangan. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 1(2), 204–219.
- Mijatovic, I., Miladinovic, S., & Stokic, D. (2015). Corporate Social Responsibility in Serbia: Between Corporate Philanthropy and Standards. In *Corporate Social Responsibility in Europe* (pp. 333–350). Springer.
- Murnita, P. E. M., & Putra, I. M. P. D. (2018). Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Nilai Perusahaan dengan Profitabilitas dan Leverage Sebagai Variabel Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi*, 1470–1494.
- Pratama, I. G. B. A., & Wiksuana, I. G. B. (2016). Pengaruh ukuran perusahaan dan leverage terhadap nilai perusahaan dengan profitabilitas sebagai variabel mediasi. *E-Jurnal Manajemen*, 5(2).
- Ratnadi, N. M. D., Ariyanto, D., & Putra, I. N. W. A. (2020). The Vitality of Employee Based Pharmaceutical Brands' Equity in Indonesia: Relationship between Environmental Management Accounting and Organization Performance. *Systematic Reviews in Pharmacy*, 11(1), 554–563. <https://doi.org/10.5530/srp.2020.1.69>
- Sabatini, K., & Sudana, I. P. (2019). Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility Pada Nilai Perusahaan Dengan Manajemen Laba Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 56–69.
- Sakti, Y. S. S., & Pudjolaksono, E. (2017). Pengaruh Pengungkapan CSR Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Sektor Pertambangan Yang Terdaftar Di BEI Periode 2012-2015. *Akuntansi Dan Teknologi Informasi*, 11(1), 1–16.
- Stacia, E., & Juniarti, J. J. (2016). Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility terhadap Nilai Perusahaan di Sektor Pertambangan. *Business Accounting Review*, 4(1), 81–90.
- Sudaryanti, D., & Riana, Y. (2017). Pengaruh pengungkapan CSR terhadap kinerja keuangan perusahaan. *Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi (PETA)*, 2(1), 19–31.
- Sugiarto, E. (2017). *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi dan Tesis: Suaka Media*.
- Sugiono. (2015). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suwardika, I. N. A., & Mustanda, I. K. (2017). Pengaruh leverage, ukuran perusahaan, pertumbuhan perusahaan, dan profitabilitas terhadap nilai

-
- perusahaan pada perusahaan properti. *E-Jurnal Manajemen*, 6(3), 1248–1277.
- Van Marrewijk, M. (2003). Concepts and definitions of CSR and corporate sustainability: Between agency and communion. *Journal of Business Ethics*, 44(2–3), 95–105.
- Votaw, D., & Sethi, S. P. (1973). The corporate dilemma: Traditional values versus contemporary problems.